1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   • Bulan April 2026: Laju inflasi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 0,41 persen secara month-to-month
   (mtm) dengan tingkat inflasi tahunan mencapai 3,66 persen secara year-on-year (yoy). Kelompok pengeluaran makanan,
   minuman, dan tembakau, khususnya komoditas beras, menjadi pemicu utama inflasi di awal Triwulan II ini. Di Kabupaten
   Pulang Pisau, harga beras subsidi (SPHP) terpantau stabil di angka Rp12.800/kg.
   • Bulan Mei 2026: Tekanan inflasi tahunan provinsi meningkat signifikan hingga menyentuh angka 4,56 persen (yoy).
   Meskipun terdapat tekanan harga yang meluas, Kabupaten Pulang Pisau tetap mampu menjaga stabilitas harga eceran
   lokal. Komoditas yang memberikan andil inflasi dominan di tingkat provinsi adalah beras, minyak goreng, dan angkutan
   udara.
   • Bulan Juni 2026: Dinamika harga sedikit melandai dengan inflasi bulanan sebesar 0,23 persen (mtm), namun akumulasi
   tahunan tetap tinggi pada level 4,47 persen (yoy). Kenaikan ini dipicu oleh kebijakan penyesuaian tarif Bahan Bakar Minyak
   (BBM) non-subsidi sebanyak dua kali sepanjang Juni 2026 yang langsung mentransmisi biaya logistik ke harga barang
   pokok. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Tengah tercatat naik dari 112,35 pada Mei menjadi 112,61 pada Juni.
   • Untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pulang Pisau Triwulan II 2026 di bulan April 2026 berkisar direntang
   antara -1,46 – -0,04. Pada Bulang Mei mengalami penurunan ke kisaran -2,42 – -2,19, Pada Bulan Juni meningkat pada
   rentang 1,96 – 3,01. Fluktuasi IPH ini mencerminkan pola musiman akibat dinamika konsumsi rumah tangga dan distribusi
   pangan antarwilayah.
   • Risiko ke Depan: Faktor non-ekonomi berupa ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan kenaikan biaya
   distribusi akibat gejolak geopolitik di pedagang menjadi risiko yang diperhitungkan secara cermat. Karhutla berpotensi
   mengganggu jalur distribusi logistik dan merusak lahan produktif food estate, yang pada akhirnya dapat memicu
   kelangkaan pasokan pangan local dan kenaikan biaya distribusi seperti naiknya harga bahan bakar akibat gejolak
   geopolitik global turut berandil dalam peningkatan harga-harga barang

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   • April: Adanya kenaikan harga pada kelompok jasa transportasi udara dan fluktuasi pasokan pangan segar di awal triwulan.
   • Mei: Tingginya harga komoditas minyak goreng bersubsidi (Minyakita) yang masih bertahan

di atas Harga Eceran Tertinggi
(HET) akibat kendala pasokan dari produsen nasional dan rantai distribusi lokal yang panjang.
• Juni: Dampak beruntun dari penyesuaian tarif BBM non-subsidi meningkatkan beban transportasi darat lintas trans Kalimantan dan transportasi sungai. Ditemukan pula pelanggaran HET pada gas LPG 3 kg di tingkat pengecer pihak ketiga
akibat ulah spekulan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia
- Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
- Melakukan Sidak Pasar
- Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait
- Memberikan bantuan transportasi

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Pulang Pisau dan koordinasi dengan
TPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di
Kabupaten Pulang Pisau. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi
serta indikasi surplus devisit pangan di masing-masing kecamatan. Inovasi dalam usaha menstabilisasi harga pangan yang masih
kurang. Keberhasilan tata kelola inflasi pada Triwulan II merupakan hasil dari keterpaduan langkah taktis dan manajerial TPID Pulang
Pisau. Pulang Pisau dinilai mampu mengonsolidasikan instrumen pengendalian harganya sehingga inflasi tetap berada dalam batas
kendali aman meskipun tekanan provinsi melampaui target nasional

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengawasan Energi: Mengintensifkan inspeksi mendadak ke pangkalan LPG bersama aparat penegak hukum untuk menertibkan
margin keuntungan pengecer tidak resmi. Optimasi Data Sensus: Mempercepat sinkronisasi data awal Sensus Ekonomi 2026 untuk
memetakan bottlenecks distribusi pada sektor UMKM pangan. Mitigasi Karhutla Berbasis Pangan: Meningkatkan investasi
infrastruktur embung pertanian pada lahan produktif guna mencegah dampak kebakaran lahan terhadap produksi padi lokal.
Penguatan Ketahanan Pangan Jangka Panjang: Melanjutkan program optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi untuk meningkatkan
indeks pertanaman padi menjadi dua atau tiga kali panen setahun agar tidak rentan terhadap fluktuasi pasokan luar daerah.